

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini nyaris tidak ada satu pun bidang kehidupan manusia yang terlepas dari istilah strategi. Bidang-bidang seperti pendidikan, politik, bisnis, pertanian, olahraga, kebudayaan, militer dan bahkan hubungan antar bangsa merupakan beberapa contoh segi kehidupan manusia yang selalu dilekati strategi dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Istilah strategi telah digunakan secara luas bukan hanya pada organisasi bisnis/perusahaan, tetapi juga pada bidang-bidang kegiatan manusia lainnya, termasuk dalam pengelolaan kegiatan politik dan pemerintahan negara. Hal ini juga, menegaskan betapa sangat vitalnya keberadaan strategi bagi keberlangsungan hidup organisasi terutama dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan-tujuannya.

Fenomena lemahnya kelembagaan partai politik di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi para akademisi ataupun ilmuwan politik di tanah air. Potret kelembagaan partai yang dianggap “dekat” dengan masalah pelanggaran hukum seperti kasus suap-menyuap, korupsi, konflik kekuasaan di internal partai, eksklusifitas partai, lemahnya fungsi partai serta janji politik di pemilu yang tidak kunjung terealisasi berimplikasi menurunnya simpatik publik terhadap partai politik. Penurunan simpatik publik terhadap partai politik tercermin dalam sejumlah temuan hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei terpercaya seperti Skala Survei Indonesia (SSI) tahun 2019, Lembaga Survei Cirrus Surveyors Group tahun 2019, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2020, dan Lembaga Survei Indonesia (2021) yang dari keseluruhan hasil survei lembaga lembaga ini menyimpulkan terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap partai politik sejak tahun 2009 hingga 2023.

Persoalan di atas tidak luput dari masalah-masalah yang muncul dalam kelembagaan internal partai politik yang cenderung melakukan aktivitas politik di internal tanpa diiringi dengan prinsip pendidikan politik

ataupun demokrasi yang dikenal secara universal seperti keadilan, keterbukaan, kesetaraan. Masalah-masalah yang terdapat dalam internal partai politik dalam lingkup nasional seperti sentralisasi keputusan yang oligarki dan bersifat “tertutup”. Masalah-masalah yang ditemukan dalam internal partai politik di lingkup nasional tersebut juga ditemukan dalam lingkup lokal seperti oligarki partai dalam pengambilan Keputusan dan hadirnya cara-cara informal dalam penentuan calon legislatif. Bila masalah-masalah dalam internal kelembagaan partai politik di tingkat nasional telah merangsek masuk dalam struktur kelembagaan partai politik di tingkat yang paling rendah maka situasi ini akan menyebabkan kemunduran bagi masa depan demokrasi Indonesia yang dapat dijabarkan dalam arti yang lebih luas lagi yaitu kemunduran pembangunan negara.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui keikutsertaan dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini mencakup memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan partai, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya. Kebalikan dari partisipasi adalah apatis. Seseorang dinamakan apatis (secara politik) jika dia tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Partai politik merupakan ciri utama sistem politik yang demokratis. Sedangkan salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh partai politik mengingat masih banyaknya masyarakat yang pendidikan politiknya masih

sangat minim atau rendah. Partai politik adalah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat disaat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus-menerus dan kenyataannya, partai politik justru memberikan contoh yang buruk. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Sebagai motor penggerak partai politik harus memiliki kader-kader yang loyal dan berkualitas. Oleh karena itu partai politik melakukan kaderisasi dan proses rekrutmen politik. Proses-proses dalam partai politik ini harus berjalan dengan terstruktur, sistematis dan masif mulai dari tingkatan terendah. Dalam hal ini tujuannya bukan hanya untuk mencapai tujuan pragmatis partai politik dalam memenangkan pemilu tetapi juga agar proses demokratisasi di Indonesia benar benar bertujuan untuk menjawab janji kemerdekaan yaitu menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu, pada prakteknya kampanye terbuka hanya bermodalkan hiburan yang menyebabkan kurang terdidiknya warga negara secara politik. Hal tersebut disertai dengan kecenderungan pasif dan mudahnya dimobilisasi untuk kepentingan pribadi dari para elite politik. Berakhirnya kemeriahan kampanye terbuka atau rapat umum partai politik, meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan pada pesta demokrasi ini yaitu proses pendidikan

politik bagi warga negara. Kampanye menjadi sarana kontrak politik melalui tatap muka, bukan jadi pesta hiburan musik atau goyang erotis lima tahunan dapat dikatakan dengan berakhirnya rangkaian pemilu, maka berakhir pula penetrasi warga negara dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka selama lima tahun kedepan.

Sebuah proses demokratisasi mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak diperlukan. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Pada realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon.

Pengembangan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon adalah sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik di Kabupaten Cirebon yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Pada kultur masyarakat Cirebon yang masih agraris, preferensi politik memang akan banyak dipengaruhi oleh faktor ketokohan. Figur tokoh yang dimaksud disini baik itu seorang tokoh agama, seorang bangsawan yang memberi penghidupan kepada orang banyak. masyarakat Cirebon akan menganut paham-paham dari orang yang menjadi panutannya. Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya.

Pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon dilandaskan kepada asas-asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat kebudayaan, khususnya generasi muda, yang dipadukan dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan pendidikan politik ini akan tercapai keberhasilan dan dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat dan diwujudkan dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya. Pendidikan politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cirebon dilakukan melalui jalan mendidik, mengajak, menampung, serta menyalurkan gagasan yang berkembang dan berciri demokrasi budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal-balik yang penuh tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya. Penyelenggaraan pendidikan politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cirebon dilakukan melalui penahanan secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan alamiah manusia dari usia bawah maupun dari segi pertumbuhan kehidupan masyarakat melalui organisasi yang ada atau golongan pendidikan, mulai dari pimpinan sampai kepada yang lebih besar dibawahnya yang semata-mata harus didasarkan atas kemampuan obyektif manusia.

Berdasarkan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa di bidang kaderisasi, langkah-langkah yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon meliputi tiga jenjang yakni tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut. Kaderisasi tingkat dasar yakni proses pendidikan politik awal yang dilakukan PKB dan tidak harus terdaftar menjadi anggota partai, kaderisasi tingkat menengah ditujukan kepada anggota partai dan lebih menekankan kepada praktik dilapangan, sedangkan tingkat lanjut merupakan tingkat kaderisasi untuk melatih jiwa kepemimpinan serta teori kepemimpinan. Pendidikan politik dilaksanakan untuk menanamkan dan menyebarluaskan ideologi serta nilai-nilai perjuangan partai. Kurangnya pendidikan politik oleh partai politik dalam pola kaderisasi partai kepada anggotanya akan berpengaruh pada kualitas anggotanya yang nanti akan maju dan mempunyai peranan dalam sistem pemerintahan baik di level eksekutif maupun legislatif. Namun, kaderisasi yang terjadi di lapangan

biasanya lebih difokuskan pada persoalan kemenangan pemilu atau pilkada saja.

Keberhasilan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cirebon dalam mempertahankan capaian elektoral menunjukkan bahwa kondisi politik di Kabupaten Cirebon sudah mulai terlihat adanya. Akan tetapi peningkatan kuantitas para kader tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah para kader yang terlibat dalam politik sudah melalui proses kaderisasi partai secara berjenjang serta memiliki kualitas yang cukup untuk membuktikan bahwa kader-kader PKB layak di ranah publik dalam memperjuangkan hak hak masyarakat atau hanya mengisi kursi yang kosong sebagai syarat partai politik dapat maju dalam pemilu. Namun yang terjadi dilapangan pada pemilu tahun 2019 dalam meningkatkan kader di DPC PKB Kabupaten Cirebon masih relatif pragmatis.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik mengkaji Manajemen Strategi Organisasi dan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Mutu Kader PKB Kabupaten Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi bebarapa permasalahan sebagai berikut.

1. Manajemen strategi sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi politik.
2. Dalam peningkatan mutu kader partai politik diperlukan gaya manajemen sendiri untuk mempertahankan capaian organisasi politik.
3. Keberhasilan organisasi politik sangat dipengaruhi oleh manajemen strategi dengan sistem manajemen yang berbeda yang didalamnya semua komponen berfungsi dengan baik.

C. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan yang hanya mencakup:

1. Penelitian ini berfokus pada praktik manajemen organisasi politik.

2. Penelitian ini berfokus pada manajemen strategi organisasi dan Pendidikan politik yang ada di dalam DPC PKB Kabupaten Cirebon.
3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai desain penelitian.
4. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data.
5. Penelitian ini melibatkan struktural pengurus DPC PKB sebagai subyek penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen organisasi DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan mutu kader partai ?
2. Bagaimanakah strategi implementasi pendidikan politik yang dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan mutu kader partai ?
3. Bagaimanakah faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi pendidikan politik DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan mutu kader partai ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sejauh mana implementasi manajemen strategi organisasi dan pendidikan politik dalam meningkatkan mutu kader PKB Kabupaten Cirebon. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis implementasi manajemen strategi organisasi bagi kader Partai PKB Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengidentifikasi implementasi pendidikan politik partai PKB Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan mutu kader.

3. Untuk mengelaborasi faktor pendukung dan pengambat implementasi pendidikan politik DPC PKB Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan, dan juga bagi para kader PKB Kabupaten Cirebon agar lebih meningkatkan mutu dalam berorganisasi.
2. Manfaat secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada berbagai pihak yang terkait, antara lain:

- a. Bagi Organisasi Politik

Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan juga referensi untuk membuat program manajemen strategi dan pendidikan politik bagi para kader sehingga dapat mencapai tujuan politik yang telah direncanakan.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi media penjunjang untuk melatih kemampuan bersikap ilmiah, berfikir kritis, dan menambah wawasan empiris dalam hal Manajemen Strategi Organisasi dan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Mutu Kader PKB Kabupaten Cirebon.

- c. Bagi UIN Syekh Nurjati Cirebon

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan penelitian selanjutnya dan berguna bagi pengembangan keilmuan pada umumnya.

- d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu landasan materi tentang pendidikan politik dan dapat memberikan kesadaran mengenai pentingnya memiliki pemahaman politik yang didapat dari pendidikan politik.